Prosiding Konferensi Nasional Mahasiswa Sejarah Peradaban Islam (KONMASPI)
Volume 3, Oktober 2026
The article is published with Open Access at: https://proceedings.uinsa.ac.id/index.php/konmaspi

Dinamika Kekuasaan di Mesir Pasca-Revolusi 1952: Pergeseran Kekuasaan dari Muhammad Naguib ke Gamal Abdel Nasser (1952–1970)

Anisa Suhartina
UIN Sunan Ampel Surabaya
anisasuhartina25@gmail.com
Achmad Zuhdi DH
UIN Sunan Ampel Surabaya
zuhdidh@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini mengkaji dinamika kekuasaan di Mesir pasca-Revolusi 1952 dengan fokus pada proses pergeseran kekuasaan dari Muhammad Naguib kepada Gamal Abdel Nasser serta transformasi politik Mesir hingga 1970. Penelitian ini bertujuan menganalisis latar belakang dan proses Revolusi 1952, dinamika hubungan politik antara Naguib dan Nasser, serta proses konsolidasi kekuasaan Nasser dan dampaknya terhadap struktur politik Mesir. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang meliputi heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Teori konflik politik digunakan sebagai kerangka analitis untuk memahami persaingan kepentingan, relasi kekuasaan, dan perubahan konfigurasi politik di antara elite pemerintahan pasca-revolusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Revolusi 1952 mengakhiri sistem monarki dan menjadi titik awal pembentukan sistem republik di Mesir. Muhammad Naguib yang pada awalnya tampil sebagai tokoh utama pemerintahan secara bertahap kehilangan posisi politiknya akibat perbedaan kepentingan dan orientasi politik dengan kelompok yang dipimpin Nasser. Setelah Naguib tersingkir dari kekuasaan, Nasser melakukan konsolidasi politik melalui reorganisasi kelembagaan dan penguatan kontrol negara. Periode 1952–1970 dengan demikian memperlihatkan perubahan struktur kekuasaan Mesir dari pemerintahan transisional pasca-revolusi menuju sistem republik yang semakin terpusat di bawah kepemimpinan Nasser.

Kata Kunci: *Revolusi 1952, Muhammad Naguib, Gamal Abdel Nasser, pergeseran kekuasaan, politik Mesir.*

PENDAHULUAN

Revolusi 23 Juli 1952 mengakhiri kekuasaan dinasti Muhammad Ali dan membuka babak baru politik Mesir. Kondisi politik pada masa Raja Farouk ditandai pergantian kabinet yang cepat dan dominasi Inggris dalam pengambilan kebijakan, dan kondisi itulah yang mendorong gerakan Perwira Bebas, bersama Ikhwanul Muslimin, menggulingkan raja(Trisnawati, 2016) Setelah revolusi, Muhammad Naguib tampil sebagai wajah publik rezim baru dan diangkat sebagai presiden ketika republik diproklamasikan pada 18 Juni 1953 (Trisnawati, 2016). Namun, pada November 1954

Naguib disingkirkan dan dikenai tahanan rumah, sementara Gamal Abdel Nasser menjadi penguasa de facto dan memegang kendali negara hingga wafat pada 1970. Pergantian ini memperlihatkan bahwa kekuasaan pasca-revolusi tidak otomatis dimiliki tokoh yang berada di puncak jabatan formal, tetapi dibentuk melalui persaingan elite yang berlangsung beberapa tahun.

Peristiwa ini penting karena menentukan corak rezim Mesir selanjutnya. Di bawah Nasser, nasionalisme Arab menjadi kekuatan yang memobilisasi dukungan rakyat dan membentuk identitas politik baru (Purba dkk., 2024) Di sisi lain, penyederhanaan sistem kepartaian ke dalam satu wadah memang menghadirkan stabilitas, tetapi sekaligus membungkam demokrasi dan partisipasi publik. Keterlibatan militer dalam politik Mesir juga mengakar kuat dan sulit dilepaskan hingga kini(Rofiq, 2016). Karena itu, memahami bagaimana kekuasaan berpindah dari Naguib ke Nasser berarti memahami asal-usul pola kekuasaan yang bertahan lama tersebut.

Sebelum disusunnya artikel ini. Peneliti mengumpulkan beberapa sumber kajian terdahulu seperti artikel ilmiah karya Diana Trisnawati dengan kajian tentang jatuhnya Raja Farouk dan proses revolusi, yang menggunakan metode sejarah kritis Kuntowijoyo untuk menelusuri kondisi Mesir sebelum dan sesudah revolusi. Kedua, artikel ilmiah karya Safna Putri Purba dkk. tentang dampak revolusi Nasser terhadap Mesir modern. Ketiga, skripsi yang mengkaji tentang hubungan rezim dengan Ikhwanul Muslimin. Berisi tentang kebijakan politik Nasser periode 1952–1970 dan implikasinya bagi Ikhwan. Keempat, kajian tentang peran militer dalam politik Mesir, karya Atep A. Rofiq berisi tentang dinamika sipil-militer.

Dari litelatur yang telah disebutkan diatas belum tampak kajian yang menjadikan pergeseran kekuasaan dari Naguib ke Nasser sebagai pokok analisis. Kajian tentang revolusi cenderung berhenti pada runtuhnya monarki, kajian tentang Nasser lebih menekankan ideologi dan kebijakannya, dan kajian tentang militer banyak berangkat dari konteks Arab Spring. Akibatnya, hubungan antara perebutan kekuasaan elite pada 1952–1954 dan pola konsolidasi rezim hingga 1970 belum banyak dijelaskan. Penelitian ini berbeda karena menempatkan perpindahan kekuasaan tersebut sebagai titik tolak untuk menelaah bagaimana otoritas dibangun dan dilembagakan sepanjang 1952–1970.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada satu masalah: *bagaimana kekuasaan di Mesir pasca-Revolusi 1952 bergeser dari Muhammad Naguib kepada Gamal Abdel Nasser, dan mengapa pergeseran itu menghasilkan konsolidasi*

kekuasaan yang bertahan hingga 1970? Tujuannya adalah menjelaskan faktor, mekanisme, dan tahapan pergeseran tersebut serta implikasinya bagi pola kekuasaan rezim. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah historiografi Mesir modern melalui pembacaan yang mengaitkan krisis elite pada fase awal pasca-revolusi dengan proses konsolidasi kekuasaan jangka panjang. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam memahami asal-usul pemerintahan berbasis militer di dunia Arab.

Untuk menjawab masalah tersebut, penelitian ini memakai metode sejarah menurut Kuntowijoyo, yakni pemilihan topik, heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi (Kuntowijoyo 2013.). Sumber primer berupa dokumen, pidato, dan pemberitaan pers sezaman yang dapat diakses publik dikumpulkan lalu diuji melalui kritik sumber, kemudian dibandingkan dengan sumber sekunder. Analisis penelitian ini bertumpu pada teori kekuasaan politik. Kekuasaan dipahami sebagai kemampuan seseorang atau kelompok memengaruhi perilaku pihak lain sesuai kehendaknya (Budiardjo, 2008), yang dalam kajian politik mencakup persoalan pengaruh, elite, wewenang, dan legitimasi. Kekuasaan juga tidak terdistribusi merata, dan kelompok dominan memakai berbagai mekanisme untuk mempertahankan posisinya (Raya dkk., 2024). Dengan kerangka ini, kedudukan Naguib dan Nasser dibaca bukan dari jabatan formal, melainkan dari kendali masing-masing atas sumber daya kekuasaan, seperti Dewan Komando Revolusi, aparat militer dan keamanan, serta dukungan kelompok masyarakat..Dengan landasan itu, artikel ini membahas secara berurutan pembentukan koalisi Perwira Bebas, perpecahan antara Naguib dan Dewan Komando Revolusi yang memuncak pada penyingkiran Naguib, serta bentuk-bentuk konsolidasi kekuasaan Nasser hingga 1970.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kronologi Revolusi Mesir 1952

Revolusi 23 Juli 1952 menandai berakhirnya kekuasaan Raja Farouk dan membuka babak baru politik Mesir. Dalam waktu kurang dari setahun, sistem monarki diganti republik pada 18 Juni 1953, dengan Muhammad Naguib diangkat sebagai presiden pertama. Namun, peristiwa ini tidak lahir dari satu peristiwa tunggal, melainkan dari akumulasi tekanan struktural, konsolidasi oposisi, dan krisis politik jangka pendek. Dominasi Inggris, ketimpangan sosial, kekalahan dalam Perang Palestina 1948, dan

ketidakstabilan kabinet saling menumpuk hingga memunculkan gerakan yang akhirnya menggulingkan raja. Di sisi lain, revolusi tidak hanya mengganti pemegang takhta, tetapi juga melahirkan *Revolutionary Command Council* (RCC) sebagai pusat kekuasaan baru (Trisnawati, 2013).

Pengaruh Inggris atas Mesir berakar sejak 1882. Kemerdekaan formal diproklamasikan pada Februari 1922, tetapi Inggris tetap memegang empat urusan vital yakni kawasan Sudan, keamanan dari intervensi asing, pengawasan Terusan Suez, dan perlindungan kepentingan asing serta minoritas. Pada 1936, aliansi Inggris – Mesir mengukuhkan kehadiran militer Inggris di Terusan Suez selama dua puluh tahun. Tahun yang sama, Farouk naik takhta pada usia tujuh belas tahun menggantikan Raja Fuad (Trisnawati, 2013).

Pemerintahan Farouk ditandai dengan adanya ketidakstabilan politik. Raja memegang hak prerogatif untuk memberhentikan dan mengangkat kabinet, sehingga jabatan pemerintahan cenderung diisi pihak yang tunduk kepada istana. Praktik korupsi di kalangan istana dan bangsawan juga menjadi pergunjingan umum menjelang revolusi. Dari sisi sosial-ekonomi, Mesir digambarkan sebagai masyarakat semi-feodal dengan jurang tajam antara tuan tanah dan petani kecil (Trisnawati, 2013).

Perang Palestina 1948 memperparah keadaan. Kekalahan Mesir menimbulkan kegelisahan di korps perwira, yang menyalahkan raja dan pemerintah atas buruknya logistik dan dukungan bagi pasukan. Setelah perang, inflasi melonjak dan upah pegawai nyaris tidak naik. Kekecewaan tersebut melahirkan sejumlah kelompok oposisi yakni Partai Wafd, Partai Sosialis Mesir, Ikhwanul Muslimin, dan gerakan Perwira Bebas, atau *Free Officers* . Dua yang terakhir menjadi basis pelaksanaan revolusi yaitu Ikhwanul Muslimin yang didirikan oleh Hassan Al - Banna dan Gerakan Perwira Bebas yang didirikan oleh Gamal Abdel Nasser (Trisnawati, 2013).

Para perwira muda mulai berdiskusi tentang persoalan sosial-politik di markas tentara Mankabad, Port Said, pada 1938. Badan rahasia dibentuk pada 1942 dengan struktur Komite Pusat, dan pada 1945 anggotanya dibagi menjadi kelompok militer di bawah Gamal Abdel Nasser dan kelompok non-militer di bawah Anwar Sadat. Setelah Perang Palestina, sembilan perwira membentuk Komite Pergerakan Perwira Bebas pada 1949, dan pada 1950 Nasser terpilih sebagai ketua secara tertutup. Ikhwanul Muslimin didirikan Hasan al-Banna pada Maret 1928 di Ismailiyah. Kerja sama dengan Perwira Bebas, menurut sumber yang sama, mengeras sejak Perang Palestina 1948 dan berlanjut

dalam perjuangan Terusan Suez 1951–1952. Pemimpin Ikhwan pasca-al-Banna, Hudaibi, memilih menyingkir selama revolusi berlangsung, meskipun para pengikutnya ikut membantu (Trisnawati, 2013).

Pada 26 Januari 1952 terjadi kerusuhan di Kairo yang dikenal sebagai "Sabtu Hitam" (*Black Saturday*). Perwira Bebas semula berencana bergerak sekitar tahun 1954 atau 1955, tetapi memburuknya keadaan membuat rencana itu dipikirkan ulang. Rapat pada 10 Februari 1952 merumuskan tiga tahap serangan: menangkap penguasa militer, menangkap penguasa sipil, dan menurunkan raja. Perwira Bebas juga menyebarkan selebaran dan karikatur anti-Farouk, dengan mesin cetak pribadi agar tidak terdeteksi. Krisis kabinet mempercepat situasi. Perdana Menteri Hilaly Pasha mundur pada 28 Juni 1952 dan digantikan Husein Sirry Pasha, yang menghadapi penolakan Partai Wafd dan hanya bertahan sekitar tiga minggu. Raja Farouk menolak pemberhentiannya. Aly Maher Pasha kemudian diangkat, dan Naguib disebut berperan dalam pengangkatan itu (Trisnawati, 2013).

Komite semula menetapkan 22 Juli sebagai awal gerakan, tetapi revolusi memuncak pada 23 Juli. Pada Rabu itu, tank dan pasukan lapis baja berpatroli di jalan-jalan Kairo, dan bentrokan meletus antara pasukan pro-raja dan Perwira Bebas, termasuk di sekitar Istana Abdin. Naguib dan rombongannya menuntut perubahan pasal konstitusi tentang hak prerogatif raja untuk memecat pemerintah dan membubarkan parlemen. Pasukan ditempatkan di Istana Abdin, Ras at-Tin, Koubbeh, dan Montazah Aly Maher berupaya membujuk raja dan menemui Naguib, sementara Duta Besar AS, Caffery, menawarkan jaminan keselamatan bagi Farouk (Trisnawati, 2013).

Farouk hanya diberi waktu sekitar enam jam untuk meninggalkan Mesir. Pada Sabtu 26 Juli 1952 ia berlayar dari Iskandaria dengan kapal pesiar, dan tiba di Italia beberapa hari kemudian. Putranya yang masih bayi, Ahmad Fuad, ditetapkan sebagai raja, dan Dewan Mangkubumi beranggotakan empat orang dibentuk untuk menjalankan pemerintahan yakni Naguib, Aly Maher, Sanhouri Pasha, dan Soliman Hafiz Bey (Trisnawati, 2013). Mereka dibantu bekas Perwira Bebas yang kemudian menamakan diri *Revolutionary Command Council* (RCC) (Trisnawati, 2016).

Pasca-turunnya Farouk, Dewan Mangkubumi yang didominasi RCC menjalankan pemerintahan hingga 1953. Langkah pertama RCC adalah membubarkan partai politik pada 16 Januari 1953, dan seluruh kebijakan selama masa transisi dipusatkan padanya, dengan transisi tiga tahun yang disepakati pada 10 Februari 1953. Pada 23 Januari 1953

dibentuk *Liberation Rally* sebagai front persatuan. Pemerintah baru juga menelusuri kasus korupsi pembelian senjata Perang Palestina yang melibatkan tiga belas opsir, serta peristiwa 26 Januari 1952. Aly Maher mundur dan Naguib mengambil alih jabatan perdana menteri (Trisnawati, 2013).

Pada 18 Juni 1953, RCC mengumumkan penghapusan monarki dan berdirinya republik. Naguib diangkat sebagai presiden pertama sekaligus menteri dalam negeri, sementara Nasser menjabat Sekretaris Jenderal *Liberation Rally* dan kekuasaannya tampak lebih dominan dalam kabinet. Penunjukan Naguib, menurut sumber ini, justru berasal dari gagasan Nasser, yang menimbang bahwa masyarakat kurang menyukai pemimpin yang masih muda (Trisnawati, 2013).

Dari kronologi ini tampak bahwa pada akhir 1953 jabatan formal tertinggi dan kendali atas sumber daya kekuasaan sudah berada di tangan tokoh yang berbeda. Naguib memegang kursi kepresidenan, sedangkan RCC dan jaringan di sekitar Nasser memegang kendali atas aparat dan arah kebijakan. Sumber yang sama menempatkan awal konflik keduanya pada masa peralihan ke republik, ketika Naguib ingin segera menggelar pemilu dan mengembalikan pemerintahan ke tangan sipil, sedangkan Nasser lebih dulu hendak memulihkan keadaan sosial-ekonomi (Trisnawati, 2013)

Konflik Muhammad Naguib dan Gamal Abdel Nasser Pasca Revolusi 1952

Sejak hari-hari pertama revolusi, kewibawaan di dalam rezim baru terbelah dua. Naguib tampil di depan publik ia duduk dalam Dewan Mangkubumi (badan perwalian atau pemerintahan sementara pasca revolusi), lalu pada 18 Juni 1953 diangkat sebagai presiden pertama republik sekaligus menteri dalam negeri. Menurut Purba dkk (2024), RCC memang diketuai Naguib dengan Nasser sebagai wakil ketua, tetapi pusat kekuasaan yang sebenarnya bergeser ke dewan. Nasser sendiri menjabat Sekretaris Jenderal *Liberation Rally* dan kekuasaannya tampak lebih dominan dalam kabinet (Trisnawati, 2013).

Latar keduanya juga berbeda. Naguib adalah perwira senior yang dihormati sejak Perang Palestina (Purba dkk., 2024) sedangkan Nasser pada 1953 berusia 35 tahun, atau 17 tahun lebih muda. Trisnawati menyebut bahwa penunjukan Naguib sebagai presiden justru berasal dari gagasan Nasser, yang menimbang bahwa masyarakat kurang menyukai pemimpin yang masih muda (Trisnawati, 2013). Britannica mencatat bahwa Perwira Bebas memandang Naguib sebagai sosok yang tepat untuk mewakili rezim di depan

publik, padahal pandangan politiknya lebih konservatif daripada Nasser dan sebagian besar Perwira Bebas lain. Naguib menghendaki kembalinya pemerintahan konstitusional dengan cepat dan menolak vonis ringkas yang dijatuhkan Pengadilan Revolusi kepada sejumlah politikus (Encyclopaedia Britannica, n.d.). Kesenjangan antara jabatan formal dan kendali nyata inilah yang menjadi bahan konflik.

RCC mengawali masa transisi dengan memusatkan kebijakan pada dirinya, partai politik dibubarkan pada 16 Januari 1953, dan transisi tiga tahun disepakati pada 10 Februari 1953. Setelah republik berdiri, menurut Trisnawati Naguib ingin segera menggelar pemilu dan menyerahkan pemerintahan kepada sipil, sedangkan Nasser berpendapat bahwa keadaan sosial-ekonomi harus dipulihkan lebih dulu. Nasser selalu memberi "catatan kecil" kepada Naguib pada setiap kebijakan, sehingga Naguib tampak seperti boneka (Trisnawati, 2013).

Dalam bukunya, Nasser menulis bahwa barisan depan telah menjebol benteng tirani dan memaksa Farouk turun takhta, tetapi massa yang diharapkan menyusul tidak datang secara terorganisasi, sehingga "the mission of the vanguard had not ended" (Nasser, 1954). Ia juga menyatakan bahwa Mesir sedang menjalani dua revolusi sekaligus, politik dan sosial, yang tuntutannya bertolak belakang, revolusi politik menuntut persatuan seluruh unsur bangsa, sedangkan revolusi sosial menggoyahkan nilai-nilai dan mengadu kelas. Peran tentara dirumuskannya sebagai penjaga untuk jangka waktu tertentu dengan batas waktu, dan ia menyebut pembentukan Komisi Konstitusi dan Dewan Produksi Nasional sebagai cara menjaga kehidupan politik dan ekonomi ke depan (Nasser, 1954).

Perselisihan di tubuh rezim berpaut dengan sikap terhadap Ikhwanul Muslimin. Menurut Trisnawati (2013), Ikhwan menjalin pertemuan mingguan dengan Angkatan Darat dan Polisi serta merencanakan kudeta pada 15 Januari 1954, tiga hari sebelumnya pemerintah menahan ratusan anggotanya, termasuk pemimpinnya, Hudaibi. (Rosidin, 2020). Pada Januari 1954 dewan pimpinan revolusi memutuskan membubarkan Ikhwan, lalu demonstrasi Ikhwan pada akhir Februari berujung pembebasan tokoh-tokohnya pada awal hingga akhir Maret.

Menurut Trisnawati (2013), Nasser dan Naguib sama-sama memusuhi Ikhwan, tetapi pandangan keduanya berbeda ketika menghadapi persoalan itu. Naguib menilai peristiwa 28 Maret 1954 sebagai "kudeta kedua" setelah kudeta 23 Juli 1952, dan Trisnawati mencatat bahwa pada tanggal tersebut terjadi pemogokan umum yang

berujung pada penangkapan anggota Ikhwan. Kemudian menyimpulkan bahwa Naguib tidak bisa mengendalikan keadaan sehingga Nasser harus tampil ke depan mengepalai pemerintahan militer (Trisnawati, 2013). Britannica mencatat bahwa pada Februari 1954 Naguib mengundurkan diri dari kepresidenan, tetapi tuntutan kelompok sipil dan militer mendorongnya kembali menjabat. Nasser, yang terus memperkuat posisinya dan menjadi perdana menteri, kemudian mengabulkan sebagian keinginan Naguib dengan membolehkan partai-partai hidup kembali dan menjanjikan majelis konstituante untuk menyusun konstitusi (Encyclopaedia Britannica, n.d.).

Peran Nasser semakin tampak ketika ia memimpin delegasi perundingan Terusan Suez dengan Inggris pada 27 Juli 1954, dan sejak itu "pamor" Naguib pelan-pelan tergeser. Pada tahun yang sama terjadi upaya pembunuhan terhadap Nasser saat berpidato di Alexandria. Menurut Rosidin (2020), Ikhwan dituduh terlibat, ribuan anggotanya ditangkap, dan mereka diadili oleh Mahkamah Revolusi yang dipimpin Jamal Salim dengan Anwar Sadat dan Hussein al-Shafi'i sebagai anggota. (Rosidin, 2020)

Dalam upaya pembunuhan terhadap Nasser pada 1954 nama Naguib terseret secara samar. Naguib dua kali menjabat presiden, yaitu 18 Juni 1953 – 25 Februari 1954 dan 27 Februari – 14 November 1954, lalu dikenai tahanan rumah yang dilonggarkan pada 1960 dan berakhir sekitar 1970, dan ia tidak lagi berperan dalam politik Mesir (Encyclopaedia Britannica, n.d.). Dengan kerangka kekuasaan politik yang dipakai dalam penelitian ini, konflik Naguib dan Nasser dapat dibaca sebagai selisih antara jabatan dan kendali. Kekuasaan dipahami sebagai kemampuan memengaruhi perilaku pihak lain (Budiardjo, 2008), yang dalam kajian politik berpaut dengan pengaruh, elite, wewenang, dan legitimasi. Naguib memegang jabatan tertinggi dan pamor publik, tetapi sumber daya yang menentukan, yaitu RCC, jaringan Perwira Bebas, dan aparat pemaksa, berada di pihak Nasser (Purba dkk., 2024). Ketika Naguib menuntut kembalinya pemerintahan sipil, ia menantang dasar pembenaran yang dibangun Nasser, yaitu bahwa tentara masih memikul tugas selama masa peralihan (Nasser, 1954).

Konsolidasi Kekuasaan Nasser dan Perubahan Struktur Politik Mesir

Konsolidasi Nasser bertumpu pada dua langkah yang saling menguatkan. Langkah pertama adalah perundingan dengan Inggris. Pada Oktober 1954 Nasser menandatangani perjanjian penarikan seluruh pasukan Inggris dari pangkalan Terusan Suez dalam dua puluh bulan, dengan syarat pangkalan dapat diaktifkan kembali bila

terjadi serangan atas Mesir atau Turki (Metz, 1990). Ketika Nasser membenarkan perjanjian itu di hadapan massa di Alexandria pada 26 Oktober 1954, seorang anggota Ikhwanul Muslimin mencoba membunuhnya. Keesokan harinya Nasser sengaja menampakkan diri kepada massa, dan popularitasnya menguat tajam.

Langkah kedua adalah menyingkirkan Ikhwan dan Naguib. Menurut Metz (1990), Nasser telah melarang Ikhwan pada Februari 1954 karena organisasi itu tidak mau berhenti menentang RCC, dan para pemimpinnya menyeret Naguib dalam serangan tersebut. Keterlibatan Naguib diragukan, tetapi peristiwa itu memberi Nasser dalih untuk mencopotnya dari kepresidenan pada November 1954.(Rosidin, 2020) mencatat bahwa ribuan anggota Ikhwan ditangkap dan diadili Mahkamah Revolusi yang dipimpin Jamal Salim, dengan Anwar Sadat sebagai salah satu anggota. Pada Juni 1956 Nasser terpilih sebagai presiden(Purba dkk., 2024), sehingga jabatan formal dan kendali nyata kini berada di satu tangan.

Krisis Suez memberi Nasser modal legitimasi baru. Setelah Amerika Serikat, Inggris, dan Bank Dunia menarik tawaran pembiayaan Bendungan Tinggi Aswan pada 19 Juli 1956, Nasser menasionalisasi Perusahaan Terusan Suez pada 26 Juli 1956 (Metz, 1990). Nasionalisasi itu dilakukan untuk menutup kekurangan dana proyek bendungan. Invasi Inggris, Prancis, dan Israel pada akhir Oktober 1956 berakhir dengan penarikan pasukan di bawah tekanan internasional, sehingga Mesir keluar sebagai pemenang politik. Nasser kemudian menasionalisasi seluruh aset Inggris dan Prancis di Mesir dan menjadi pahlawan dunia Arab.(Purba dkk., 2024)

Pada 1958 Mesir dan Suriah membentuk Republik Arab Bersatu dengan Nasser sebagai presiden(Purba dkk., 2024). Sesudah keretakan dengan Suriah, Nasser memusatkan perhatian pada penerapan sosialisme Arab di dalam negeri (Metz, 1990). Di dalam negeri, Nasser merumuskan Piagam Nasional pada 1962. Piagam yang pada dasarnya disusun sendiri olehnya itu menjadi landasan konstitusi berikutnya, dan sekaligus membentuk Uni Sosialis Arab (ASU) sebagai satu-satunya partai politik dan sarana menghimpun dukungan massa (Metz, 1990). Pada Juli, bertepatan dengan peringatan kesembilan kudeta 1952 (yakni 1961), Nasser mengumumkan nasionalisasi seluruh bank swasta, semua perusahaan asuransi, lima puluh perusahaan pelayaran, serta perusahaan industri berat dan dasar. Undang-undang reforma agraria kedua menurunkan batas kepemilikan tanah dari 200 menjadi 100 feddan, dan separuh kursi parlemen serta badan-badan terpilih dicadangkan bagi petani dan buruh (Metz, 1990). Pemilu Majelis

Nasional pada Maret 1964 memakai daftar calon yang disusun ASU, dan rancangan konstitusi yang diumumkan seusai pemilu itu berlaku hingga 1971 (Metz, 1990).

Purba (2024) menyebut sistem ini sebagai "demokrasi terpimpin" yang mempertahankan lapisan proses demokrasi tetapi dengan otoritas pusat yang kuat. Sudarsono (2006) mencatat bahwa peleburan seluruh kekuatan politik dalam satu wadah menghasilkan dua dampak: stabilitas politik di satu sisi, dan terbungkamnya demokrasi serta partisipasi publik di sisi lain, dengan implikasi praktis pembubaran seluruh kekuatan oposisi.

Konsolidasi berlangsung bersamaan dengan menyempitnya ruang oposisi. Sejak awal rezim bertindak keras, pemogokan buruh pabrik tekstil Kafr ad-Dawwar pada Agustus 1952 ditumpas tentara, pengadilan militer menjatuhkan hukuman mati kepada dua orang, dan sekitar tiga puluh orang yang dituduh komunis ditangkap (Metz, 1990). Menurut Purba (2024), Nasser melarang kelompok oposisi dari spektrum Islamis maupun kiri. Militer menjadi institusi sentral dalam politik Mesir, meskipun tidak memerintah secara langsung, banyak jabatan tinggi pemerintahan dipegang bekas perwira (Purba dkk 2024). Rofiq (2015) menyebut infiltrasi militer yang sudah berlangsung sekitar enam puluh tahun membuat pengaruhnya sulit dihapus dari kepemimpinan Mesir.

Kekalahan dalam Perang Juni 1967 menjadi ujian terberat. Mesir kehilangan sekitar 10.000 prajurit dan 1.500 perwira tewas serta sekitar 80 persen peralatan militernya, Sinai diduduki Israel, dan Terusan Suez tertutup (Metz, 1990). Pada 9 Juni Nasser mengundurkan diri lewat televisi, tetapi rakyat turun ke jalan dan kabinet serta Majelis Nasional menolak pengunduran diri itu, sehingga ia menariknya kembali. Setelah itu Marsekal Amir dan Menteri Pertahanan Badran dipaksa mundur, dan pada 19 Juni Nasser menjadi perdana menteri sekaligus sekretaris jenderal ASU (Metz, 1990). Pada 25 Agustus 1967 Amir, yang pernah dianggap sebagai sahabat terdekat Nasser di antara Perwira Bebas, bersama sekitar lima puluh pejabat militer dan sipil ditangkap atas tuduhan merencanakan penggulingan Nasser, dan Amir kemudian diumumkan bunuh diri dalam tahanan rumah (Metz, 1990).

Pada Maret 1968 pecah demonstrasi mahasiswa dan buruh di Kairo, Alexandria, dan Hulwan, dipicu vonis pengadilan militer atas dua komandan angkatan udara. Metz (1990) menilai penyebab mendasarnya adalah frustrasi atas represi selama enam belas tahun dan minimnya partisipasi rakyat. Sebuah program baru disahkan lewat referendum Mei, yang menjanjikan konstitusi baru, reformasi ASU, kebebasan pribadi dan pers yang

lebih besar, serta pemilu Majelis Nasional. Reorganisasi ASU selesai pada Oktober 1968, tetapi demonstrasi dengan seruan "Nasser resign" muncul lagi pada November karena program itu belum dijalankan (Metz, 1990).(Purba dkk., 2024) menyebut demonstrasi 1968 sebagai demonstrasi besar pertama sejak 1954, dan mencatat bulannya sebagai Februari, berbeda dari Metz. Nasser wafat karena serangan jantung pada 28 September 1970 (Purba dkk., 2024)

Dengan kerangka kekuasaan politik yang dipakai penelitian ini, konsolidasi Nasser berlangsung dalam tiga lapis. Pertama, kendali atas jabatan dan aparat, dari RCC dan jabatan perdana menteri (1954), ke kepresidenan (1956), dan, setelah 1967, perdana menteri sekaligus sekretaris jenderal ASU (Metz, 1990). Kedua, kendali atas sumber daya ekonomi melalui nasionalisasi (Metz, 1990), yang memperluas kemampuan negara memengaruhi perilaku kelompok-kelompok sosial (Budiardjo, 2008, Efriza, 2016). Ketiga, pembenaran ideologis lewat nasionalisme Arab dan sosialisme, yang menopang legitimasi sambil mengukuhkan militer sebagai penjaga stabilitas (Purba dkk 2024). Metz (1990) menilai Nasser tidak pernah benar-benar membuka kekuasaannya bagi partisipasi rakyat, dan menginginkan basis dukungan yang tidak mengharuskan rezim membagi kekuasaan nyata kepada publik.

Perubahan strukturnya dapat dirumuskan sebagai pergeseran dari pemerintahan transisional di bawah RCC menuju republik presidensial berpartai tunggal yang terpusat pada Nasser. Guncangan 1967–1968 memperlihatkan batas pola itu, legitimasi yang bersumber dari capaian seperti Suez dan persatuan Arab tergerus kekalahan militer, tetapi struktur dasarnya bertahan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pergeseran kekuasaan dari Muhammad Naguib kepada Gamal Abdel Nasser merupakan hasil persaingan elite pasca-Revolusi 1952 yang berlangsung bertahap, bukan peristiwa tunggal. Revolusi 23 Juli 1952 lahir dari akumulasi tekanan berupa dominasi Inggris, ketimpangan sosial, kekalahan dalam Perang Palestina 1948, dan ketidakstabilan kabinet. Tekanan itu mendorong Perwira Bebas bersama Ikhwanul Muslimin menggulingkan Raja Farouk. Revolusi ini mengakhiri monarki, melahirkan *Revolutionary Command Council* (RCC) sebagai pusat kekuasaan baru, dan membuka jalan bagi proklamasi republik pada 18 Juni 1953.

Dalam kerangka teori kekuasaan politik, konflik Naguib dan Nasser dapat dibaca sebagai selisih antara jabatan formal dan kendali atas sumber daya kekuasaan. Naguib memegang kursi kepresidenan dan pamor publik, tetapi RCC, jaringan Perwira Bebas, dan aparat pemaksa berada di pihak Nasser. Perbedaan arah politik mempertajam persaingan itu. Naguib menghendaki pemilu dan pengembalian pemerintahan kepada sipil, sedangkan Nasser mendahulukan pemulihan sosial-ekonomi dan peran tentara selama masa peralihan. Krisis sepanjang 1954 memberi dalih bagi Nasser untuk menyingkirkan Naguib pada November 1954. Krisis itu meliputi pelarangan Ikhwanul Muslimin, perundingan Terusan Suez, dan percobaan pembunuhan terhadap Nasser pada 26 Oktober 1954. Konsep pretorianisme Perlmutter membantu menjelaskan mengapa persaingan ini diselesaikan lewat kendali atas lembaga bersenjata, bukan prosedur sipil. Meski begitu, penerapannya pada rezim Nasser masih perlu diuji dengan sumber yang membahasnya secara langsung.

Setelah Naguib tersingkir, konsolidasi kekuasaan Nasser berlangsung dalam tiga lapis. Lapis pertama adalah kendali atas jabatan dan aparat, dari RCC dan jabatan perdana menteri (1954), kepresidenan (1956), hingga rangkap perdana menteri dan sekretaris jenderal Uni Sosialis Arab (ASU) setelah 1967. Lapis kedua adalah kendali atas sumber daya ekonomi melalui nasionalisasi dan reforma agraria. Lapis ketiga adalah pembenaran ideologis lewat nasionalisme Arab dan sosialisme, yang diperkuat oleh legitimasi Krisis Suez 1956. Hasilnya adalah pergeseran struktur kekuasaan dari pemerintahan transisional di bawah RCC menuju republik presidensial berpartai tunggal yang terpusat pada Nasser. Stabilitas itu dibayar dengan menyempitnya ruang oposisi dan partisipasi publik. Kekalahan dalam Perang Juni 1967 dan gelombang demonstrasi 1968 memperlihatkan batas legitimasi rezim, tetapi struktur dasarnya bertahan hingga Nasser wafat pada 1970.

DAFTAR PUSTAKA

Metz, H. C. (Ed.). (1990). *Egypt: A country study*. Federal Research Division, Library of Congress.

Nasser, G. A. (1954). *Philosophy of the revolution*. [1959].

Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar ilmu sejarah*. Tiara Wacana

Purba, S. P., Umar Lubis, A. B., Hannase, M., & Muttaqin, M. I. (2024). Sejarah Nasionalisme Arab: Revolusi Gamal Abdul Nasser dan Implikasinya pada Mesir Modern. *POLITEA*, *7*(1), 24. https://doi.org/10.21043/politea.v7i1.24565

Raya, D., Rizky, R., Robiatul, C., Az-zahra, J., Azizah, W., & Rafa, M. (2024). Sumber Kekuasaan Dalam Negara: Analisis Berdasarkan Teori Konflik Karl Marx. *Public*

Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum, *3*(2). https://doi.org/10.59818/jps.v3i2.810

Rofiq, A. A. (2016). MELACAK DINAMIKA SIPIL-MILITER PASCA REVOLUSI MESIR. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, *2*(1). https://doi.org/10.15408/sjsbs.v2i1.2244

Rosidin, S. (2020). *IKHWANUL MUSLIMIN: PEMIKIRAN DAN PERGERAKAN SOSIAL-POLITIK ISLAM ABAD 20 DI*.

Trisnawati, D. (2016). REVOLUSI MESIR 23 JULI 1952: BERAKHIRNYA PEMERINTAHAN RAJA FAROUK. *ISTORIA: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sejarah*, *12*(1). https://doi.org/10.21831/istoria.v12i1.9543

Trisnawati, D. (2013). *Revolusi Mesir 23 Juli 1952: Berakhirnya pemerintahan Raja Farouk* [Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta]. Lumbung Pustaka UNY. https://eprints.uny.ac.id/16232/

Encyclopaedia Britannica. (n.d.). *Mohammed Naguib*. Diakses pada 8 Oktober, dari https://www.britannica.com/biography/Mohammed-Naguib